

Terorisme, Agama dan Keamanan

Oleh: Zuly Qodir

A. Pendahuluan

Lima tahun terakhir negeri ini senantiasa sibuk dengan persoalan terorisme di Indonesia, dan kawasan *international terrorism* yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disinyalir menjadi salah satu basis teroris di Asia Tenggara oleh negara-negara seperti Singapura, Filipina, Australia dan Amerika. Tentu saja membuat bangsa ini gerah dan tidak nyaman dengan berbagai stigma yang dialamatkan kepada negeri berpenduduk mayoritas muslim dengan basis muslim moderat, sekalipun beraliran Wahabi.

Tentu mengundang banyak pertanyaan dalam benak banyak pihak terkait dengan isu terorisme yang sampai saat ini terus menjadi *headline* beberapa majalah dan koran internasional, ketika terjadi penangkapan aktivis-aktivis terorisme di Indonesia, sekalipun mereka berkebangsaan Malaysia. Beberapa pertanyaan tersebut antara lain:

- Mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror, sebagai teroris? Apa sebenarnya alasan-alasan yang menjustifikasi aksi terorisme dilakukan?
- Siapakah mereka para pelaku teror di muka bumi itu? Bisakah mereka perorangan, kelompok maupun organisasi bahkan lembaga (individual atau negara)?
- Dimanakah mereka melakukan aksi teror? Siapa sebenarnya target sasaran teroris. Atau dengan pertanyaan lain, pekerjaan teroris dikerjakan di area mana, mengapa daerah tersebut yang menjadi sasaran, dengan alasan apa?
- Sampai kapanakah aksi-aksi

terorisme akan berlangsung dalam sebuah negara? Dalam bahasa lain dapat dirumuskan untuk kepentingan apakah aksi-aksi teror dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara?

Itulah beberapa pertanyaan yang mengusik banyak pihak, sebab aksi-aksi teroris jelas sekali secara nalar dan akal sehat merugikan banyak pihak dan membuat masyarakat tidak aman alias terganggu tetapi mengapa terus dilakukan oleh beberapa individu dan kelompok masyarakat? Bukankah mereka juga memiliki satu nyawa, memiliki sanak saudara, memiliki keluarga dan lebih penting lagi adalah bukankah mereka memiliki agama yang tidak pernah mengajarkan tentang membunuh orang lain, tetapi harus saling mengasihi?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan diatas, ada beberapa tesis yang akan saya ajukan di sini, sehingga kita kemudian dapat memberikan penjelasan tentang terjadinya aksi-aksi terorisme yang terus berlangsung di tanah air. Tentu saja tesis yang saya ajukan bukan kemudian untuk membenarkan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi bahkan oleh negara. Tesis yang saya ajukan berguna untuk memberikan semacam "panduan" pada kita sehingga kita memahami terorisme dalam perspektif yang lebih memadai alias lebih objektif. Objektif tidak berarti membenarkan, tetapi menempatkan persoalan yang saya bahas dalam posisi yang lebih proporsional.

Beberapa tesis yang saya ajukan antara lain sebagai berikut dan tentu saja bisa ditambah lagi tesis yang lain sehingga semakin banyak yang dapat dikemukakan. Namun saya membatasi hanya beberapa tesis di bawah ini terkait dengan terorisme di Indonesia.

- Ada beberapa kelompok agama (Islam, Kristen, Hindu, Yahudi) melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap pihak lain dan sekaligus sebagian membenarkan perilaku kekerasan tersebut.
- Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab atas terjadinya terorisme di sebuah negara dilakukan oleh sekelompok orang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, ekonomi, dan budaya (agama)

- Perilaku terorisme karena ada sesuatu yang “dibela” dibelakangnya, apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya, dan
- Keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama yang membenarkan perilaku teroris dilakukan.

B. Pemahaman Tentang Terorisme

Soal terorisme bukan persoalan mudah untuk dijelaskan. Apalagi jika akan dicarikan definisi yang baku. Ada banyak definisi tentang terorisme. Tetapi secara agak umum definisi terorisme menjelaskan ada hubungannya dengan kekerasan dan perilaku tindakan yang mengancam masyarakat. Tetapi untuk sekedar memahaminya, ada beberapa kriteria dengan terorisme. Di antaranya adalah, pertama, berkaitan dengan persoalan legalitas (hukum) sehingga bersifat kriminal, dan mudah cara mengukurnya dan menindaknya. Sekaligus bersifat politik, karena lintas ideologis, lintas geografis, lintas negara dan lintas suku demi mempertahankan harga diri dan kekuasaan politik tertentu.

Kedua, terorisme senantiasa dihubungkan dengan persoalan keter tindasan, perebutan kebebasan (perjuangan untuk kebebasan), dari penindasan yang dilakukan oleh partai politik dan rezim militer tertentu. Mereka ini bergerak karena adanya sikap kebencian atas orang lain, karena persoalan bukan hanya modernitas, demokrasi, ketidakadilan, dan ekonomi modern yang tidak mengindahkan kesejahteraan tetapi penumpukan kapital. Mereka bergerak karena hendak melawan penindasan yang sangat dominan dalam hal ekonomi, politik dan budaya militer atau rezim tertentu. Orang Amerika, bosan dengan perilaku kelompok orang yang menutup pintu dengan berdoa dulu, demikian tulis Thomas Friedman, sebagaimana dikemukakan Bruce L Lavrence. (hal. Lavrence, 198-199)

Ketiga, perilaku terorisme itu

berkaitan dengan perilaku, tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan menggunakan cara-cara kekerasan fisik maupun non fisik (ancaman), dan menghasilkan efek publikasi yang maksimum. Perilaku terorisme merupakan tindakan yang akan berefek pada publik atas apa yang dilakukan. Teror yang dilakukan Israel atas Palestina dengan membunuh banyak orang yang ada di Palestina sebenarnya akan berdampak sangat luas karena pemberitaan dari media yang demikian gencar. Demikian pula dengan terorisme di Afganistan oleh kelompok Bin Laden dan Amerika. Tindakan mereka sangat mengancam dan berbahaya. (Edward W Said, hal. 279-279)

Keempat, perilaku terorisme juga berkaitan dengan soal kepuasan batin, karena hendak mempertahankan sebuah ideologi tertentu yang diyakini, persoalan politik kepentingan yang ada di dalamnya dan metode yang dipilih adalah untuk menumbuhkan ancaman, rasa takut dan tindakan kekerasan seperti kelompok-kelompok “rindu masa lalu”. Kita juga tidak bisa mengabaikan adanya proyek politik internasional dalam pekerjaan terorisme. Kita lihat ulasan seorang analis dunia Islam dan terorisme, Mahmood Hamdani, menyatakan siapa yang harus bertanggung jawab dengan peristiwa terorisme, pasca

adanya Perang Dingin dan Perang Indochina? Orang berpikir merekalah yang akan menjadi pemenang dalam konflik pasca perang dingin dan Indocina sebagai terorisme internasional. (Hamdani, 2006: hal. 254)

Beberapa penjelasan tentang bagaimana kita memahami terorisme di atas saya maksudkan agar tidak membuat simpulan-simpulan yang gegabah tentang aksi terorisme yang marak di tanah air dan Asia

Tenggara, karena memang rumitnya membahas masalah terorisme internasional. Tetapi dengan beberapa penjelasan bisa diharapkan memberikan pandangan ketika membahas masalah terorisme.

C. Pandangan Tentang Terorisme

Terdapat padangan lain yang juga dapat membantu untuk memahami persoalan terorisme yang menjadi masalah banyak orang. Beberapa pandangan tentang terorisme tersebut adalah pandangan Filsafati: sebagai bagian dari pemikiran yang sangat radikal (dari seseorang atau kelompok/ organisasi) dan negara tentang apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari perilaku untuk memberikan pemahaman, ancaman dan menakut-nakuti orang lain.

Dalam pandangan filsafati tidak ada satu tindakan yang tidak memiliki akar kuat dalam masing-masing orang yang bertindak. Semua tindakan senantiasa memiliki akar yang kuat sehingga pelakunya merasa yakin dengan apa yang dikerjakan tersebut. Akar filosofis memberikan daya dukung pada apa yang dikerjakan di lapangan, apakah akan membahayakan atau tidak, tidak menjadi pertimbangan utama dalam aksi-aksinya.

Selain pandangan filosofis, pandangan lain mengenai terorisme berhubungan dengan persoalan psikologis: dalam perspektif *behaviorisme* dilakukan dengan cara-cara mengancam hidup orang banyak, dilakukan dengan sadar sekalipun ada faktor "pembekalan" sebelum melakukan aksi teror pada pihak lain. Psikologis behavioristik memberikan penjelasan bahwa perilaku seseorang atau kelompok dilakukan bukan tanpa tujuan. Setiap tindakan senantiasa memiliki tujuan apakah baik atau buruk, dan berdampak luas ataukah tidak tetapi secara teoritik dia senantiasa dengan perilaku yang mengerjakan. Dan jika tindakan sudah dilakukan maka peni-

laiannya adalah pada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat itu sendiri selain pada diri pribadi yang melakukannya. Kasus bom bunuh diri dapat dilihat dalam perspektif psikologi behaviorisme sebagai tindakan pribadi berdampak individual sekaligus berdampak sosial.

Cara pandang lain tentang terorisme adalah pandangan politik: dilakukan karena adanya dominasi dan hegemoni politik tertentu atas sebuah negara, kelompok dan SARA sehingga menimbulkan ketertindasan, dan peminggiran yang berakibat pada adanya kecemburuan, kejengkelan dan kebencian pada aktor-aktor politik yang dianggap menjadi dalang atas sistem yang berlangsung tidak adil selama bertahun-tahun dalam sebuah negara atau atas sebuah negara di muka bumi.

Pandangan politik memikirkan bagaimana perilaku politik sebuah rezim kekuasaan negara apakah dalam negeri ataukah negara lain dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik sebuah negara. Apakah kebijakan politiknya menguntungkan kelompok yang dianggap mayoritas ataukah tidak. Seandainya kebijakan politiknya tidak menguntungkan mayoritas (dalam konteks Indonesia adalah Islam), maka secara tidak langsung mereka akan melakukan aksi-aksi protes dengan cara-cara halus dan kekerasan. Bentuk demonstrasi pawai (*long march*) di jalan raya, pembuatan spanduk dan poster, serta pembuatan surat protes pada negara sampai anarki adalah bentuk-bentuk protes warga negara atas ketidakadilan yang berlangsung dalam sebuah negara. Pandangan

politik menempatkan terorisme dalam perspektif pemberontakan namun dengan cara-cara kekerasan, bukan sekedar *civil disobedience*.

Pandangan lain tentang terorisme adalah perspektif ekonomi: perlawanan secara ekonomi atas ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah pelaku ekonomi (bisnis) sehingga menyebabkan keteringgalan ekonomi. Tentu kita dengan mudah dapat mendapatkan pembenaran atas argumen ini karena dalam banyak literatur, apa yang dinamakan globalisasi ekonomi ternyata membawa dampak pada terjadinya ketidakadilan ekonomi sebuah negara. Janji kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengurangi pengangguran dan pemecatan tenaga kerja ternyata tidak terbukti di lapangan. Persoalan ini mengakibatkan kemarahan dikalangan masyarakat yang tersingkir secara ekonomi. (Manfred, 2006: hal. 23-40, Joseph Stiglitz, 2004: 49)

Perspektif lain yang senantiasa hadir dalam pembahasan terorisme adalah perspektif agama: agama secara tidak langsung mendorong adanya perilaku dan tindakan yang dianggap "suci" berdasarkan perintah agama (teks agama) yang dipahami sebagai perintah suci untuk berjihad. Banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli agama dan tafsir agama tentang adanya ayat-ayat dalam kitab suci yang dianggap mendukung terjadinya aksi-aksi kekerasan (terorisme) yang dilakukan oleh kelompok agama. Apakah kelompok agama Islam, Hindu, Yahudi maupun Kristen. teks-teks suci keagamaan biasanya menjadi landasan suci untuk kelompok agama berbuat yang mengancam dan bertentangan dengan misi kemanusiaan.

Penjelasan Scott Appleby tentang *Ambivalency the Sacred* terkait adanya teks-teks keagamaan yang sering dianggap memiliki tafsir

ganda bahkan *multi interpretable* membuat banyak ayat suci seakan-akan mendukung adanya aksi-aksi terorisme berbasis agama. Appleby bahkan menyatakan itulah resiko agama yang berdasarkan pada teks suci keagamaan, karena itu akan sangat tergantung dengan bagaimana pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh mereka. (Appleby, 2001)

D. Beberapa Penyebab Terorisme

Fenomena terorisme dan lainnya termasuk aksi-aksi kekerasan, maka kita sering membayangkan bahwa mereka bermula dari komunitas agama-agama. Yang terbayang dalam benak kita adalah adanya persoalan kejiwaan, persoalan sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi penyebab atas semua itu. Selain itu, yang juga menjadi bayangan kita adalah bahwa dalam tradisi keagamaan selalu akan muncul dengan apa yang dinamakan sang mesiah, sang penyelamat yang turunnya pada zaman-zaman akhir. Komunitas keagamaan tersebut muncul karena mendambakan seorang mesias.

Seorang teolog dan sosiolog agama, Gregory Baum misalnya, menyinyalir bahwa munculnya komunitas keagamaan yang hendak menyelamatkan disebabkan karena terjadinya alineasi dalam komunitas keagamaan, sehingga membutuhkan semacam panduan yang baru. Orang-orang yang teralineasi membutuhkan figur yang

dianggap mampu menjadi penyelamat dari kehancuran kehidupannya. Inilah yang kemudian memunculkan tradisi mesias dalam lingkungan Kristiani, bahkan munculnya protestanisme di samping teologi pembebasan karena didasarkan pada analisa konflik kelas ala Marxian. (Gregory Baum, 1975: 227-238)

Sementara, sosiolog agama lainnya, Bryan Wilson menyebutkan bahwa penyebab munculnya komunitas-komunitas agama yang kadang "galak" atas kelompok dalam agamanya dalam kehidupan tradisi agama "resmi" tidak lain karena merespon masalah-masalah sosial dalam lingkungan masyarakat sipil terkait keburukan ekonomi, politik, keteladanan dan "mimpi" tentang sang penyelamat. Tatkala kondisi sosial demikian tidak menentu kemana arah perubahan tidak jelas kemana akan dibawa dan entah kapan dapat diatasi, kemudian muncul seseorang yang dengan berani mengemukakan janji-

janji pada publik, dan memberikan ajaran kutbah yang secara rasional dianggap bisa menyelesaikan masalah bahkan menawarkan “jalan baru”, maka sebagian orang akan segera terpicak untuk mengikutinya. Inilah sebetulnya yang menjadi bagian dari milenarianisme agama-agama. (Bryan Wilson, hal. 309-314)

Selain dari dua hal diatas, hal yang tidak bisa diabaikan adalah gagalnya dakwah agama yang bersifat transformatif, tetapi sekaligus keberhasilan dakwah (misi) agama yang bersifat agitatif-tanpa konteks. Dakwah agama merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam hubungannya dengan karakteristik masyarakat beragama. Jika dakwah yang dikembangkan merupakan dakwah yang bersifat karitatif dan agitatif akan sangat mungkin menghasilkan masyarakat yang penuh dengan kebencian, sekalipun mungkin dalam sisi lainnya adalah masyarakat yang militan dalam beragama. Sementara jika misi atau dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang lebih bersifat transformatif dan pemberdayaan masyarakat, akan sangat mungkin terjadinya perubahan sikap keberagamaan yang lebih simpatik dan mengarah pada rekayasa-rekayasa sosial.

Perspektif ini juga hal yang menurut hemat saya tidak bisa diabaikan yakni terjadinya perebutan legitimasi sebagai basis dari otoritas untuk memiliki kekuasaan melakukan penafsiran, melakukan kontrol sekaligus mempertahankan tradisi dari hal-hal yang dianggap “salah” dan “sesat” dalam kacamata rezim agama dan rezim politik tertentu yang tengah berkembang menjadi *mainstream* dalam sebuah negara atau komunitas. Perebutan legitimasi untuk mempertahankan otoritas dalam hal penafsiran dan keputusan inilah yang oleh Merdeith Mc. Guice disebut sebagai kompetisi mempertahankan sumber-sumber otoritas, termasuk legitimasi keagamaan, sekalipun tidak jarang menjurus pada status quo keagamaan. (Merdeith B Mc Guice (1982: 183-185))

Dalam konteks Indonesia dan beberapa negara sangat jelas memperlihatkan betapa negara seringkali menjadikan agama sebagai alat kontrol dan mengontrol agama secara leluasa. Jika agama dikontrol oleh negara dengan kuat maka akan menjadikan agama hanya sekedar menjadi “agama rezim”. Dan jika agama yang mengontrol negara, maka akan sangat mungkin agama mengkooptasi negara sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penaklukan agama atas negara dan munculnya negara agama menjadi mungkin sekali terjadi.

E. Dampak Terorisme

Jika kita perhatikan pelbagai peristiwa terorisme yang menggunakan kekerasan dan pemboman maka ada hal-hal yang bisa kita masuk sebagai bagian dari dampak terjadinya terorisme. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- Kematian jiwa manusia dalam jumlah yang beragam, bisa banyak bisa sedikit. Bisa pelakunya ataupun orang yang menjadi target sasaran (pihak yang dimusuhi). Kita lihat misalnya, para pelaku bom bunuh diri selalu meninggal karena

Jika kita percaya pada pemahaman-pemahaman dan persepektif yang saya kemukakan di atas, maka secara keseluruhan sebenarnya ada persoalan dengan pendidikan agama yang lebih bercorak formalisme-indoktrinatif, sehingga kurang memberikan ruang refleksi dan kritis pada peserta didik yang mendapatkan pembelajaran. Terutama di sekolah-sekolah berbasis non agama (sekolah umum) dan belakangan di sekolah-sekolah berbasis agama. Pendidikan agama ini tentu akan terkait dengan pemahaman keagamaan, yakni karena adanya keyakinan atas teks agama yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad.

- Agama menjadi sumber dari terorisme apabila tindakan teror merupakan perwujudan dari perintah Tuhan (teks), baik secara langsung atau tidak sebagai persyaratan dalam bentuk ritual. Karena secara langsung tidak ada dalil (teks) agama yang menyatakan tentang teror, maka lebih banyak karena interpretasi tentang teks keagamaan (seperti jihad) dalam Islam, mati syahid, dan Perang atas Nama Jesus dalam Kristen. Agama bukan merupakan penyebab, tetapi sebagai pembenar atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan, ancaman dan pembunuhan atas orang lain.

bom bunuh diri dianggap merupakan bagian dari jalan jihad bukan *suicide* dalam maknanya yang negatif. Tetapi bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari cara-cara menuju kesempurnaan hidup di jalan Tuhan.

- Selain adanya kematian jiwa, hal yang sangat jelas menjadi dampak dari terorisme juga berupa kerugian material karena peristiwa perusakan (baik pemboman, pembakaran, maupun lainnya) sehingga menjadi beban pada pihak yang dirusak (individu maupun negara). Keru-

gian material merupakan hal yang nyaris tidak pernah terelakkan tatkala aksi-aksi terorisme terjadi di sebuah negara atau sebuah daerah. Seperti terjadi di JW Marriot dan Ritz Charton Hotel Jakarta oleh kelompok Noordin M Top jelas meninggalkan beban material.

• Aksi-aksi terorisme, juga akan berdampak psikologis membuat masyarakat penerima semakin terancam, para pelaku merasa puas dengan apa yang dilakukan, dan menjadi dampak pada masyarakat apa yang dinamakan “politik teror”. Derrida dan Noam Chomsky pernah menulis bahwa terorisme yang terjadi seringkali memunculkan apa yang dinamakan politik teror; yakni sebuah teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas masyarakat karena diliput oleh media dan menjadi pemberitaan besar, maka yang terjadi sesungguhnya adalah penyebaran aksi-aksi terorisme, atau dengan bahasa lain itulah sebenarnya para teroris sedang menebarkan politik teror.

Itulah yang paling jelas dari dampak pada media, media memberitakan secara besar-besaran sehingga muncul dengan kuat apa yang dinamakan “imajinasi teror” dan sekaligus “politik teror” sebagaimana target dari perilaku terorisme. Jika telah terkonstruksi menjadi bagian dari politik teror maka yang muncul di lapangan adalah menjadi bagian dari

imajinasi masyarakat, termasuk di Indonesia.

• Dampak Hukum, merupakan dampak yang sangat jelas bagi para pelaku aktivis teroris diperkarakan secara hukum (baik hukum internasional, HAM, dan pidana) atas perilaku yang dilakukan. Dalam banyak diskusi tentang aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia selalu berharap para pelaku aksi teroris diajukan pada jalur hukum apakah dia menjadi perkara kriminal ataukah perkara hukum lainnya, yakni melanggar HAM internasional dan seterusnya.

F. Masalah Keamanan dan Kewajiban Negara

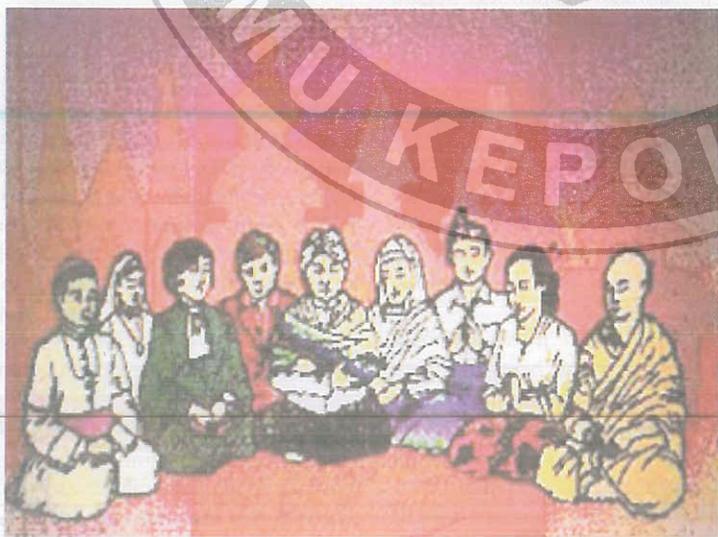
Jika kita memperhatikan persoalan hak warga negara yang paling asasi, dan hak asasi yang paling fundamental maka salah satu pasal yang sangat penting menjadi landasan di Indonesia adalah Pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara. Negara harus melindungi apapun agama dan keyakinan warga negara tersebut. Namun pada

kenyataannya tidak setara dan tidak memadai.

Selain berlandaskan pada pasal 29 UUD 1945 di atas, warga negara juga harus mendapatkan perlindungan dari pelbagai macam bentuk ancaman yang datang dari warga negara lain atau sesama warga negara. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apa pun, dari ancaman orang lain yang akan mengganggu kehidupannya.

Inilah sebenarnya salah satu bentuk memberikan rasa aman warga atas tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, ancaman dan perlakuan semena-mena warga negara yang lain. Negara dituntut dengan sangat oleh konstitusi yang ada, Undang-Undang maupun peraturan untuk memberikan perlindungan warga negara dari pelbagai bentuk ancaman fisik dan non fisik.

Keamanan juga akan menjadi penting dalam kaitannya dengan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan atas warga negara karena warga negara telah membayar pajak. Negara dilarang mengabaikan warga negara untuk urusan kesejahteraan. Negara sebenarnya sebagaimana diamanatkan oleh Dek-



larasi Hak Hak Asasi Manusia harusnya memberikan jaminan perumahan, pendidikan, pekerjaan dan dan hari tua karena warga negara telah membayar pajak. Namun karena kesejahteraan warga negara seringkali tidak terpenuhi maka yang terjadi adanya “pemberontakan” atau ketegangan-ketegangan yang akan mengganggu masyarakat lainnya dengan pelbagai ulah yang seringkali merugikan masyarakat itu sendiri. Negara harus hadir menjadi penjamin kesejahteraan warganya.

Kewajiban negara yang sangat penting lainnya adalah melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan mengekspresikan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara tidak boleh bersekutu dengan kelompok masyarakat yang ada di sebuah negara kemudian melakukan aksi-aksi yang hendak meniadakan atau hendak mengusir salah satu penganut agama yang dianggap sesat. Negara tidak dibolehkan

sama sekali menjadi pemicu utama dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tentang keagamaan masyarakat yang dianggap sesat, sehingga warga negara lainnya menghujat bahkan merusak tempat-tempat ibadah warga negara yang berbeda dengan mainstream. Kasus Ahmadiyah, Islam Wetu Telu, Islam Adat, agama adat di beberapa daerah nusantara adalah bentuk lemahnya perlindungan negara atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia.

G. Menata Kembali Agama dan Negara

Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan aksi-aksi terorisme, di Indonesia, perasaan aman, nyaman dalam beragama harus menjadi perhatian serius pihak negara dan masyarakat sipil. Negara tidak bisa semena-mena menerapkan hukum bahwa ada kelompok agama yang sesat karena itu harus diberhentikan aktivitasnya atau menyuruh lembaga-lembaga kenegaraan untuk melakukan bumi hangus secara semena-mena. Hal yang harus dikerjakan oleh negara dalam kaitannya dengan terorisme, keamanan dan agama adalah:

- Penegakan hukum yang adil dalam negara untuk masyarakat. Aparat penegak hukum, termasuk aparat keamanan harus berani bertindak tegas atas mereka yang melanggar hukum resmi atau hukum positif. Hukum seperti kita ketahui tidak boleh ditegakkan karena berdasarkan pertimbangan hak politik, kekuasaan dan keuangan. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar hukum sudah seharusnya mendapatkan hukuman setimpal bukan dilihat dekat dengan siapa dan memiliki kekuasaan apa. Jika demikian yang terjadi adalah hukum diberlakukan secara pandang bulu (kuasa, uang dan politik). Inilah sebenarnya sumber politik hukum dan manipulasi peradilan

berlangsung di Indonesia.

- Penegak hukum dan aparat keamanan tidak boleh berlindung di balik, delik “pelanggaran HAM” tatkala akan menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan sekitaran agama, sebab pelaku kekerasan internal agama itulah yang telah melanggar kebebasan dalam beragama. Aparat keamanan harus memiliki bekal yang memadai tentang apakah HAM dan apakah pekerjaan yang melanggar HAM. Jika aparat penegak hukum belum memiliki penguasaan yang memadai maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana ada pendidikan HAM untuk para aparat penegak hukum secara intensif dan benar-benar efektif.
- Melakukan desiminasi atas pelbagai macam peraturan pemerintah atau UU yang ditetapkan pemerintah pada masyarakat khususnya terkait tata kelola agama dalam masyarakat secara detail dan persuasif. Ada banyak peraturan dan undang-undang yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, karena itu merupakan tugas pemerintah melalui kementerian informasi dan departemen dalam negeri juga departemen Hukum dan HAM untuk mensosialisasi tentang banyaknya peraturan dan undang-

undang yang ada, terutama undang-undang dan peraturan yang baru. Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu peraturan dan undnag-undang.

- Negara sebaiknya tidak terlalu banyak dan terlalu mencampuri urusan-urusan keimanan seseorang dengan memberikan labeling pada salah satu kelompok agama tertentu yang akan berdampak kurang positif pada level masyarakat. Penilaian yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan derajat keimanan sebaiknya tidak dilakukan oleh institusi negara. Memang ada banyak perdebatan dalam persoalan ini, tetapi saya kira memilih untuk menempatkan negara tidak turut campur dalam masalah-masalah keyakinan, keagamaan dan hal-hal prinsipil kemanusiaan dengan Tuhan merupakan pilihan yang paling masuk akal sebab soal keyakinan merupakan urusan seseorang dengan pemberi hidup bukan dengan sesama makhluk hidup. Inilah yang menurut saya menjadi problematik di negara Pancasila bukan negara agama.
- Negara sebaiknya mengkhhususkan pada masalah-masalah pencegahan kekerasan berbasis agama, pelarangan kelompok-kelompok agama yang hendak melakukan perusakan, mengacaukan ketertiban dan meresahkan masyarakat. Dalam posisi ini negara melalui aparat keamanan sebaiknya sebagai pelindung, penjaga keamanan dan ketertiban.
- Agama didakwahkan dengan cara-cara yang tidak agitatif, mencederai sesama penganut agama, melukai agama lain, memprofokasi perbuatan-perbuatan kekerasan, dan membuat keresahan di masyarakat, tetapi dakwah transformatif. Sudah saatnya mendakwahkan agama dengan cara yang empatik atas berbagai varian agama dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Agama tidak diceramahkan untuk menghakimi dan mengadili serta menjelekkan pihak lain, apalagi untuk membenci dan memusuhi pihak lain yang berbeda dengan kita sebagai sesama penganut agama Tuhan.
- Agama dan ormas agama sebaiknya bekerjasama dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, bukan bekerjasama dalam hal-hal yang mengarah pada persoalan-persoalan keimanan, sebab keimanan merupakan hal asasi dari masing-masing penganut agama. Dalam bentuk lainnya tentu saja ormas agama tidak perlu melakukan agitasi terhadap kelompok agama lain yang secara formal tampak berbeda, sebab dalam kaitan dengan keimanan yang harus dipahami adalah formalisme tentu akan berbeda tetapi substansi biasanya menemukan persamaan. Disinilah umat beragama harus bekerjasama dalam kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai universal dalam internal agama dan antar agama harus menjadi landasan bersama dalam menata hubungan antara masyarakat sipil dengan negara, sehingga antara peran negara dan peran agama tidak saling bertabrakan satu sama lain. Tanpa mengindahkan adanya kesepakatan bersama tentang kemanusiaan, maka yang akan terjadi sebenarnya tetap beragama dalam ketegangan dan kebencian karena masing-masing kelompok agama saling mengintip untuk mencari kekurangan dan kesalahan pihak lain.
- Sistem Pendidikan agama harusnya didekatkan dengan realitas hidup masyarakat dan bercirikan memberikan pencerahan dan pembebasan manusia dari jeratan kehidupan. Agama diajarkan sebagai sumber nilai universal dan kemanusiaan. Dengan model

pendidikan semacam ini, saya mempercayai agama tidak akan semakin jauh dengan umatnya, tetapi semakin mendekatkan umat beragama dengan ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini lahir dari konsteks sosial dan historis yang terjadi.

Memperhatikan persoalan terorisme seperti telah dikemukakan di atas, betapa sulitnya menemukan satu pemahaman tunggal dan penyebab tunggal maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai orang beragama dan warga negara tidak terjebak dalam pemahaman yang serba kaku tentang agama dan istilah-istilah yang krusial. Kita harus berhati-hati dalam memaknai masalah yang sangat sensitif dan berdimensi sangat luas. Terorisme akan berdekatan dengan agama, politik, ekonomi dan budaya serta masyarakat lokal tergantung darimana kita melihatnya. Itulah yang penting untuk dijadikan pijakan sehingga tidak melakukan *blamming* atas persoalan yang sensitif di masyarakat.